BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sejak Pemerintah Republik Indonesimemberlakukan otonomi daerah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004), maka setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri, termasuk didalamnya mengenai keuangan daerah. Sejalan dengan itu Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan reformasi

Pengelolaan keuangan negara dengan mengeluarkan Undang-Undang bidang keuangan Negara (UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1 Tahun 2004 dan UU No 15 tentang Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara), tata cara pelaporan keuangan pemerintah yang dirasakan kurang transparan dan akuntabel telah berubah, karena sebelumnya laporan keuangan tersebut belum sepenuhnya disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang sejalan dengan standar akuntansi sektor publik yang diterima secara Internasional, sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah atau Asset Daerah. Terjadi adanya perubahan paradigma baru dalam pengelolaan barang milik daerah atau asset daerah yang ditandai dengan di keluarkannya PP No. 6 Tahun 2006 yang merupakan peraturan turunan dari UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menimbulkan optimisme baru dalam penataan

dan pengelolaan aset daerah yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan untuk kedepannya. Pengelolaan aset daerah yang professional dan modern diharapkan akan mampu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan stake holder lainnya kepada pemerintah untuk pengelolaan asset daerah. Permasalahan dalam pengelolaan asset daerah tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan dari peraturan perundang-undangan yang disebutkan diatas, namun juga dipengaruhi karena banyaknya asset daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Dalam rangka mengoptimalisasi manejemen daerah, saat ini Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengembangkan aplikasi komputer berupa Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Tujuan dari pengembangan program aplikasi SIMDA ialah (1) menyediakan database tentang kondisi di daerah secara terpadu mulai dari aspek kepegawaian, aset daerah, keuangan hingga pelayanan publik, (2) menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah yang dapat digunakan sebagai acuan pengambilan keputusan, (3) mempersiapkan aparat daerah untuk mampu menguasai dan mendayagunakan teknologi informasi, dan (4) memperkuat basisi pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Program implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang telah diimplementasikan meliputi implementasi SIMDA Keuangan, SIMDA Barang Milik Daerah (BMD), SIMDA Gaji dan SIMDA Pendapatan

Sistem informasi manajemen atau SIMDA adalah suatu sistem yang bersifat menyeluruh, bertujuan untuk menyajikan informasi yang jauh lebih luas daripada informasi akuntansi yang bersifat historis (Widjayanto, 2001: 21). Sistem informasi manajemen yang selalu menggunakan teknologi pengolahan data elektronik, dengan menggunakan teknologi komputer maka tingkat efisiensi pekerjaan akan semakin meningkat. Lebih jauh lagi sistem informasi manajemen dapat mengkomunikasikan seluruh output yang dihasilkan dari masing-masing sub sistem yang kemudian diintegrasikan menjadi sebuah informasi yang diperlukan bagi manajemen dalam pengambilan keputusan.

Organisasi sektor publik yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat juga harus dapat menyediakan sisteminformasi yang bersifat interaktif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Tujuan dari pelaporan keuangan sektor publik adalah menyediakan informasi mengenai sumber daya, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan, menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya, menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam membiayai aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya, menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas dan perubahan yang terjadi,dan menyediakan informasi secara keseluruhan yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas menyangkut biaya jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan (Bastian, 2010: 297)

Pemerintah Daerah memerlukan sistem yang dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya secara lebih komprehensif yang meliputi informasi mengenai posisi keuangan daerah, kondisi kinerja keuangan, dan akuntabilitas Pemerintah Daerah. Sistem tersebut juga harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah.

Dengan semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas lembaga-lembaga public baik di pusat maupun di daerah, maka pengelolaan keuangan menjadi sangat penting. Dalam konteks organisasi pemerintahan, akuntabilitas publik dapat dikatakan sebagai suatu bentuk pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut. Mardiasmo (2016) menjelaskan bahwa: Akuntabilitas publik adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.

Organisasi sektor publik khususnya organisasi pemerintahan merupakan entitas yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuanganya kepada publik. Pemerintah adalah sebuah organisasi sektor publik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan merupakan pendorong serta fasilitator dalam keberhasilan pembangunan di suatu daerah Handayani, (2010). Organisasi sektor publik yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat juga harus dapat menyediakan sistem informasi yang bersifat interaktif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Tujuan dari pelaporan keuangan sektor publik adalah menyediakan informasi mengenai sumber daya, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan, menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya, menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam membiayai aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya, menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas dan perubahan yang terjadi,dan menyediakan informasi secara keseluruhan yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas menyangkut biaya jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan (Bastian, 2016: 48)

Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) mulai diperkenalkan pada tanggal 29 Agustus 2006. Program aplikasi ini dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pemabgunan (BPKP) guna membantu pengelolaan keuangan daerah ditingkat SKPD (Satuan

Kerja Perangkat Daerah). Adanya program aplikasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat lebih kepada Pemda dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dapat diimplementasikan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, menggunakan teknologi client, server, dari penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan. Namun menurut (Devi 2013) berdasarkan hasil penelitiannya menyatakan bahwa SIMDA belum sepenuhnya digunakan secara optimal, yang menyebabkan penerapan SIMDA oleh Organisasi Pemerintah Daerah belum dapat membantu mencapai tujuan organisasi Pemda secara maksimal.

Desentralisasi dan *good governance*, merupakan bagian dari demokratisasi yang sedang dijalankan dimasa ini. Artinya, dalam kehidupan demokrasi sistem pemerintahan yang diterapkan haruslah sistem desentralisasi yang di dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada konsep *good governance*. Kunci utama yang digunakan untuk memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Berdasarkan prinsipprinsip tersebut akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan menyadari pentingnya masalah tersebut, prinsip-prinsip *good governance* menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* meliputi: akuntabilitas, pengawasan, daya tanggap, profesionalisme, efisiensi dan efektivitas, transparansi, kesetaraan, wawasan ke depan, partisipasi, penegakan hukum. Terwujudnya clean governance atau

pemerintahan yang bersih dapat dilakukan melalui Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam tata kelola kepemerintahan, sehingga kepemerintahan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini tentu menjadi dasar tolak ukur laporan keuangnan daerah yang pada dasarnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang memiliki tupoksi dalam bidang ini.

Laporan keuangan daerah merupakan komponen penting dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan laporannya mampu terukur sehingga dapat melihat sejauh mana capaian kinerja berdasarkan laporan keuangan daerah yang disajikan. Sebagaimana dijelaskan oleh Mardiasmo, (2016) dimana Laporan keuangan organisasi sektor publik publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan daerah yang berkualitas dalam pembuatan laporan keuangan juga dibutukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dalam pembuatan laporan keuangan. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu organisasi/perusahaan disamping faktor lain. Sumber Daya Manusia yang berkualitas merupakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi.

Kompetensi yang diperlukan dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah antara lain pemahaman dalam akuntansi pemerintah dan penguasaan penggunaan aplikasi yang ada. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas harus bertumpu pada pemenuhan kriteria penyajian laporan keuangan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No 1 Tahun 2010 merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, antara lain: a). Relevan, b). Andal, c). dapat dibandingkan, d). dapat dipahami.

Pemerintah Kabupaten Buol yaitu Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Buol merupakan salah satu instansi pemerintah daerah dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pengelolaan keuangan daerah guna menghasilkan laporan keuangan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan organisasi/instansi pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi di bidang Pendapatan, Pengelolaan Asset Daerah yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Pada taraf pelaksanaannya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol beberapa kendala memiliki beberapa isu startegis. Isu-isu strategis yang saat ini berkembang sesuai dengan tugas pokok

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol sebagaimana tercantum dalam Laporan Kinerja Instasi Pemerintah (LKJIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol yakni: kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang penatausahaan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, kurangnya SDM dalam bidang penatausahaan terlihat pada jumlah staf yang bertugas di bagiannya, serta masih sering terjadi kekeliruan serta masih lambat dalam menyelesaikan pekerjaan.

Selain itu, Kurangnya sikap dan motivasi dari Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) lain dalam menyelesaikan laporan keuangan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan, hal ini tentu akan berimbas pada Dinas pelaksana dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dimana BPKAD selalu mendapatkan dituntut tepat waktu oleh Badan Pengawas Keungan dan Pembangunan dalam melaporkan keuangan masing-masing Organisasi Pemerintah Daerah, sementara OPD sendiri kurang memiliki loyalitas kerja, terkesan acuh tak acuh dan sering mengulur-ngulur waktu pelaporan. Hal ini menjadi salah satu patologi birokrasi yang sudah sejak lama ada dan tidak ada gerakan untuk melakukan perubahan, jika demikian, maka dipastikan akan mempengaruhi kinerja Dinas teknik itu sendiri. Untuk itulah sangat diperlukan adanya perubahan, serta masih perlunya perbaikan dan penyempurnaan dari proses perencanaan anggaran, penatausahaan sampai dengan penyusunan laporan keuangan untuk menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),

meskipun Kabupaten Buol telah mendapatkan WTP, akan tetapi masih terdapat kendala sehingga perlu dilakukan pembenahan, secara kasat mata, laporan keuangan yang sudah mendapatkan predikat WTP merupakan pengelolaan daerah dinilai sudah sangat bagus dan perlu adanya dukungan dan apresiasi dari pemerintah terkait dengan predikat yang diperoleh Kab. Buol saat ini, namun tidak menutup kemungkinan bahwa pengelolaan keuangan masih mengalami kendala teknis.

Berbagai permasalah diatas membuat peneliti menafsirkan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah perlu dilakukan pengkajian kembali dalam bidang manajemen berdasarkan teori G. R. Terry, dalam (Sukarna, 2011) dimana fungsi manajemen yang terdiri dari a. *Planning*, b. *Organizing*, c. *Actuating*, dan d. *Controlling*. Adapun faktor-faktor penentu yang digunakan peneliti dalam melihat implementasi pengelolaan keuangan SIMDA di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Buol sesuai dengan kondisi permasalahan di atas, maka peneliti menggunakan PSAP No 1 Tahun 2010, dimana untuk mencapai kualitas laporan kuangan pemerintah harus memenuhi empat praasyarat agar penyajian keuangan dapat berkualitas. terdiri dari: a). Relevan, b). Andal, c). Dapat dibandingkan, d). Dapat dipahami

Berdasarkan konteks penelitian, terkait dengan isu strategis yang terjadi, maka peneliti tertarik mengambil judul "**Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Di BPKAD Kabupaten Buol".**

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian, maka yang menjadi fokus dan sub fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) di BPKAD Kabupaten Buol, dengan sub fokus:
   a. Bagaimana *Planning* pada sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) di BPKAD Kabupaten Buol
   b. Bagaimana *Organizing* pada sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) di BPKAD Kabupaten Buol
   c. Bagimana *Actuating* sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) di BPKAD Kabupaten Buol
   d. Bagaimana *Controlling* pada sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) di BPKAD Kabupaten Buol
2. Determinasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) di BPKAD Kabupaten Buol yang dikaji dari:
   a. Bagaimana faktor Relevan pada sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) di BPKAD Daerah Kabupaten Buol
   b. Bagaimana faktor tingkat keandalan pada sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) di BPKAD Kabupaten Buol
   c. Bagaimana faktor dapat dibandingkan pada sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) di BPKAD Kabupaten Buol
   d. Bagaimana faktor dapat dipahami pada sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) di BPKAD Kabupaten Buol.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan:

1. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) di BPKAD Kabupaten Buol yang dikaji dari: a). Planing, b). Organizing, c). Actuating, d). Controlling.
2. Determinasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) di BPKAD Kabupaten Buol yang dikaji dari: a). Relevan, b). Tingkat Keandalan c). Dapat di bandingkan d). Dapat dipahami.

C. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian peneliti ini terdiri dari:

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat di masukkan untuk:

   a. Menambah sumbangan pengetahuan tentang bidang kajian ilmu Administrasi Publik manajemen pemerintah daerah pada umumnya dan secara khusus berkaitan dengan penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah.

   b. Bagi dunia akademisi, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan dapat dikembangkan dalam pengambilan strategi implementasi pengelolaan keuangan daerah berbasis online BPKAD.

2. Manfaat praktik

   a. Bagi Pemerintah Daerah Kab. Buol pada dinas BPKAD, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukkan bagi BPKAD dalam

meningkatkan penggunaan SIMDA untuk sistem pelaporan keuangan sehingga mewujudkan pemerintah *governance*.

b. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menjadi pengetahuan tentang pentingnya suatu kajian ilmiah yang bersifat empirik pengelolaan keuangan yang melibatkan masyarakat sebagai pengguna informasi.